

# **SINERGI ANTAR *STAKEHOLDERS* DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA GUNUNG KERINCI DI KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI**

Oleh

Hendri Duan Sitio dan Dwita Hadi Rahmi, M.A  
Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada  
hendridunansitio@mail.ugm.ac.id

## **Abstract**

*There are several ways to integrate environmental policies and improve the rural economy, one of them by ecotourism. Well – managed ecotourism could preserve some benefits, for instance sustain biodiversity, initiate add funds for environmental conservation, absorb local labor, increase local income and reduce poverty. As a well-known ecotourism object in Jambi Province, Mount Kerinci has several problems such as: the low level of tourist visits, the high number of tourist accidents and inadequate condition of climbing facilities and infrastructure also become the problem in Gunung Kerinci. The ecotourism management of Gunung Kerinci consist of many stakeholders which causes another challenge in term of management system. As a consequence, ecotourism management needs to be planned with a participatory approach and synergized among all stakeholders by taking into account the existing potential. Purpose of this study to describe the synergy between stakeholders in the management of Gunung Kerinci ecotourism, that use a qualitative deductive as a research method, whilst data analysis uses descriptive qualitative analysis methods. Based on the results of this study, there is still room for improvement in terms of synergy between stakeholders of Gunung Kerinci Ecotourism, could be seen from policies at the central level that have not been well-translated at the local level, stakeholder activities are not integrated and communication relations that exist between actors that have not been effective.*

*Keywords: Ecotourism, Stakeholders, Synergy, Management, Rural*

## **A. PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 menyebutkan pemanfaatan taman nasional dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan panas, pemanfaatan angin, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan wisata alam, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya dan pemanfaatan tradisional. Pengelolaan wisata alam yang berada di taman nasional memegang prinsip ekowisata, artinya pengembangan potensi wisata tetap memperhatikan aspek ekologi sehingga keseimbangan dan kelestarian ekosistemnya tetap terjaga. Ekowisata merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dalam upaya pembangunan nasional dan daerah.

The International Ecotourism Society (2016) mendefenisikan ekowisata sebagai kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara professional, terlatih dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu usaha ekonomi yang mempertimbangkan warisan budaya,

partisipasi dan kesejahteraan penduduk lokal serta upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan.

Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) adalah salah satu kawasan pelestarian alam yang memiliki potensi ekowisata. Gunung Kerinci sebagai gunung berapi tertinggi di Indonesia (3.805 mdpl), merupakan salah satu objek ekowisata unggulan di TNKS dan Provinsi Jambi. Sebagai objek ekowisata unggulan yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, Gunung Kerinci memiliki beberapa masalah seperti rendahnya tingkat kunjungan wisatawan, tingginya angka kecelakaan yang terjadi di jalur pendakian, tingkat aktivitas gunungapi yang berada pada level waspada serta kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.

Pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci melibatkan banyak elemen stakeholder yang menyebabkan kendala tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan di atas. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang baik antar semua stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci agar pengelolaan ekowisata sesuai dengan yang diharapkan dapat terwujud. Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci dan mendiskripsikan sinergi yang terbentuk antar stakeholder dalam pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci pada saat ini.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilaksanakan pada periode bulan Agustus 2019 sampai dengan September 2019 di objek ekowisata Gunung Kerinci Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Sugiyono (2018), menyebutkan metodologi penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Variabel yang digunakan untuk mendiskripsikan sinergi antar masing-masing stakeholder berupa sinergi kebijakan, sinergi kegiatan dan sinergi antar aktor. Penjelasan variabel, indikator dan deskripsi masing-masing indikator dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Variabel dan Indikator Penelitian Sinergi Antar Stakeholder

Variabel	Indikator	Deskripsi
<b>Sinergi Kebijakan</b>	Komitmen terhadap tujuan bersama	Adanya penyesuaian dan penyelarasan dalam perumusan tujuan bersama
<b>Sinergi Kegiatan</b>	Standar/ ukuran dan prosedur	Terdapat standar/ ukuran/ prosedur dalam penyusunan kegiatan terkait pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci
	Koordinasi	Adanya integrasi masing-masing stakeholder terhadap kegiatan terkait
	Daya Dukung Sumberdaya	Tersedianya sumber keuangan, dukungan teknis, SDM dan fasilitas pertemuan
<b>Sinergi Aktor</b>	Struktur jaringan komunikasi	Terdapat pelembagaan hubungan antar instansi yang aktif berkomunikasi
	Kepercayaan diantara para pihak	Adanya keyakinan dan kepercayaan antar instansi satu dengan yang lain terkait upaya dari masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama

Sumber: Pengolahan data, 2019

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa data hasil observasi di lapangan dan wawancara secara mendalam dengan teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan meliputi seluruh informasi, dokumen dan arsip pendukung yang berhubungan dengan penelitian. Proses analisis data yang dilakukan meliputi reduksi data, pengujian reabilitas dan validitas data melalui triangulasi sumber-sumber data yang berbeda dan penarikan kesimpulan yang disusun berdasarkan setiap variabel dalam penelitian.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### C.1. Identifikasi Stakeholder

Hasil identifikasi *stakeholders* yang terkait dengan pengembangan ekowisata di Gunung Kerinci diklasifikasikan ke dalam lima kelompok yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, masyarakat, konsultan/ perencana dan swasta. Jumlah stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata di Gunung Kerinci adalah sebanyak 22 yang disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. *Stakeholders* yang Terlibat dalam Pengelolaan Ekowisata Gunung Kerinci

No	Klasifikasi	Instansi/ Stakeholder
1	Pemerintah Pusat ( <i>Central Government</i> )	Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat; Pos Pemantauan Gununggapi Kerinci; Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi
2	Pemerintah Daerah ( <i>Local Government</i> )	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi; Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci; Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kerinci; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kerinci; Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci.
3	Masyarakat ( <i>Community</i> )	Masyarakat Sekitar Gunung Kerinci; Kelompok Pecinta Alam; Komunitas Pemandu Wisata; Kelompok Tani Kerinci; Flora Fauna Indonesia
4	Konsultan/ perencana ( <i>Consultant/ Planner</i> )	Konsultan <i>Forest Programme</i> II; Yayasan Ekowisata Indonesia
5	Swasta ( <i>Business</i> )	Pengusaha Penginapan; Travel Agen; Pengusaha Transportasi; Penjual Souvenir; Penjual Makanan
6	Luar Negeri ( <i>Foreign</i> )	<i>Kreditanstalt Für Wiederaufbau</i>

Sumber: Pengolahan data, 2019

Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) merupakan unit pelaksana teknis yang secara struktural berada di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BBTNKS merupakan stakeholder penting karena berperan sebagai pengelola Gunung Kerinci. Sedangkan Pos Pemantauan Gununggapi Kerinci merupakan unit pelaksana teknis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang secara struktural berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pos Pengamatan Gununggapi merupakan instansi yang berperan dalam pengamatan dan penentuan tingkat aktivitas gununggapi yang mencerminkan potensi ancaman erupsi gununggapi tersebut. Sementara itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi secara struktural berada di bawah Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Kantor Pencarian dan Pertolongan Jambi berperan dalam melakukan evakuasi kepada pengunjung yang mengalami kecelakaan dan mengadakan pelatihan terkait *Search and Rescue*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi berperan dalam melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku ekowisata serta penyediaan informasi dan melaksanakan promosi. Adapun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kerinci yang wilayah hutannya berbatasan dengan TNKS berperan dalam melakukan pembinaan masyarakat sekitar hutan dan pengamanan kawasan hutan dari gangguan seperti perambahan, illegal logging dan perburuan liar.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Kerinci, Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora)

Kabupaten Kerinci, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kerinci, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kerinci yang berkedudukan di ibukota kabupaten. Semua stakeholder tersebut adalah perpanjangan tangan Bupati Kerinci untuk melaksanakan misi daerah dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2014-2019 yaitu “Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat berbasis pertanian, industri mikro, kecil dan menengah, serta pariwisata”.

Para pemangku kepentingan dari unsur masyarakat terdiri dari masyarakat sekitar Gunung Kerinci, Kelompok Pecinta Alam, Pemandu Wisata, Kelompok Tani Kerinci dan Flora Fauna Indonesia. Stakeholder dari unsur masyarakat berperan sebagai penyedia pelayanan ekowisata di Gunung Kerinci, baik sebagai pemandu wisata, travel agen dan porter. Masyarakat juga berperan dalam kegiatan perlindungan sumber daya alam dan obyek ekowisata. Pemangku kepentingan lainnya adalah dari unsur konsultan/ perencana yang terdiri atas Konsultan *Forest Programme* II dan Yayasan Ekowisata Indonesia. Konsultan *Forest Programme* II berperan berperan mendampingi BBTNKS dalam pelaksanaan *Forest Programme* II yang dananya bersumber dari hibah luar negeri yaitu pemerintah Jerman melalui *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* (KfW). Yayasan Ekowisata Indonesia merupakan stakeholder yang berperan dalam pembuatan desain tapak ekowisata Gunung Kerinci. *Stakeholder* dari unsur swasta terdiri dari pengusaha penginapan, *travel agent*, pengusaha transportasi, penjual souvenir dan penjual makanan. Pemangku kepentingan unsur kelompok swasta memiliki peran dalam penyedia kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan penyediaan jasa pariwisata yang dibutuhkan pengunjung. Adapun pemangku kepentingan dari luar negeri yaitu *Kreditanstalt Für Wiederaufbau* yang merupakan bank asal Jerman yang memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia. Stakeholder ini berperan dalam menyediakan dana untuk kegiatan konservasi dalam hal ini di Taman Nasional Kerinci Seblat.

## **C.2. Sinergi Pengelolaan dalam Berbagai Aspeknya**

### **C.2.1. Sinergi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang terkait pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci, ditemukan peraturan 28 dokumen terkait yang meliputi: 4 dokumen Undang-Undang (UU), 4 dokumen Peraturan Pemerintah (PP), 7 dokumen Peraturan Menteri (Permen/Kepmen), 4 dokumen Peraturan Daerah (Perda), 1 dokumen rencana strategis (renstra), 1 dokumen perjanjian kerja sama (PKS). 5 dokumen

Undang-Undang tersebut, antara lain: 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya; 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ansell dan Gash (2007) menyatakan salah satu ciri sinergi adalah mempunyai tujuan bersama yang diwujudkan dan berorientasi pada hasil bersama. Pemahaman bersama dapat diartikan sebagai *common mission* (misi umum), *common purpose* (tujuan umum), *common objectives* (obyektivitas umum), dan *shared vision* (visi bersama). Pemahaman yang dimaksud adalah penyatuan pemikiran dan persamaan tujuan dalam bentuk kebijakan, sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antar *stakeholders*.

Dari berbagai analisis kebijakan terkait ekowisata di tingkat nasional dan daerah secara umum sudah ada penyesuaian dan penyelarasan dalam perumusan tujuan bersama terkait pengelolaan ekowisata, namun terdapat beberapa kebijakan di tingkat nasional yang belum tertuang di dalam dokumen/ kebijakan tingkat daerah antara lain:

a. Pembangunan Kelembagaan Ekowisata

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah terdapat kebijakan terkait pembangunan kelembagaan pariwisata dan pembentukan susunan kepengurusan tim koordinasi ekowisata di provinsi dan kabupaten/kota, namun kebijakan terkait pembentukan kelembagaan pariwisata/ ekowisata tidak terdapat di dalam dokumen kebijakan di tingkat provinsi maupun kabupaten.

b. Perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan

Sejak tahun 2007 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menetapkan tingkat aktivitas Gunung Kerinci berada pada level II (Waspada) dengan rekomendasi masyarakat di sekitar gunungapi kerinci dan pengunjung/wisatawan tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah aktif. Namun sampai dengan saat ini pengunjung/wisatawan masih melakukan pendakian sampai ke bibir kawah aktif.

Undang-Undang Kepariwisata Pasal 26 huruf d, menyatakan setiap pengusaha kepariwisataan berkewajiban memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan. Namun di dokumen kebijakan tingkat provinsi dan daerah tidak ada tertuang kebijakan tentang perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan khususnya di Gunung Kerinci yang memiliki potensi bencana dan merupakan gunungapi aktif tipe A.

### **C.2.2. Sinergi Kegiatan**

Kegiatan masing-masing stakeholder terkait pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya. Kegiatan dari beberapa stakeholder tersebut dikelompokkan 6 kegiatan pokok yaitu: kegiatan terkait pelayanan dan perijinan, kegiatan perlindungan sumberdaya alam, kegiatan pembangunan infrastruktur ekowisata, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan promosi, publikasi dan informasi serta kegiatan terkait perencanaan dan pengembangan ekowisata.

Terkait manajemen kegiatan pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci, belum terdapat standar/ukuran/prosedur baku yang dibuat dan disepakati antar stakeholder. Sudarmono (2011) menyebutkan salah satu keberhasilan sinergi adalah adanya akses terhadap otoritas (*access to authority*) yang ditandai dengan tersedianya standar, ukuran maupun prosedur yang jelas dan diterima secara luas dan menjadi landasan dan standar dalam mengimplementasikan keputusan.

Bentuk koordinasi yang terbentuk antar stakeholder tercermin dari integrasi masing-masing stakeholder terhadap kegiatan. Secara umum koordinasi yang dilakukan stakeholder terkait kegiatan pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci tidak merata, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat selaku pengelola ekowisata Gunung Kerinci melakukan koordinasi terbanyak dengan stakeholder lain yang melibatkan 27 jenis aktivitas koordinasi. Sementara stakeholder dari unsur masyarakat masih cenderung pasif dalam menjalankan koordinasi dengan stakeholder lain. Terkait daya dukung sumberdaya, masing-masing stakeholder memiliki dukungan keuangan, teknis, sumber daya manusia dan fasilitas pertemuan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan kemampuan masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan manajemen kegiatan berbeda satu dengan yang lainnya.

### **C.2.3. Sinergi Aktor**

Sampai dengan saat ini kelembagaan ekowisata maupun pariwisata di Kabupaten Kerinci belum terbentuk. Hal ini mengakibatkan komunikasi yang terbentuk antar stakeholder tidak berjalan dengan maksimal. Kelembagaan ekowisata yang belum terbentuk juga menyebabkan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang tidak jelas. Najiyati dan Topo (2011) menyebutkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara stakeholder yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

Dari hasil wawancara, kepercayaan yang terbangun antara masyarakat dan pemerintah belum sepenuhnya baik. Masyarakat menganggap saran dan masukan yang selama ini diusulkan terkait pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci belum diakomodasi oleh

stakeholder dari unsur pemerintah. Agranoff dan Mc Guire (2003) menyebutkan faktor kepercayaan (*trust*) merupakan faktor penguat sinergi antar stakeholder. Rasa saling percaya ini berupa adanya keyakinan atas informasi atau usaha-usaha dari pihak lain kaitannya dengan pencapaian tujuan bersama.

#### **D. KESIMPULAN**

Terdapat 22 *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci yang terbagi dalam enam kelompok yaitu pemerintahan pusat, pemerintah daerah, masyarakat, konsultan/ perencana, swasta dan luar negeri. Secara umum sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata Gunung Kerinci sudah mulai terbentuk. Akan tetapi terdapat beberapa masalah yang ditemukan dalam implementasi sinergi tersebut seperti: kebijakan di tingkat pusat yang belum diterjemahkan dengan baik di tingkat daerah, kegiatan masing-masing stakeholder yang masih belum terintegrasi dan hubungan komunikasi yang terjalin antar aktor yang belum efektif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ansell, Chris, dan Alison Gash. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Vol. 18, No.4, hal. 543 – 571.
- Agranoff, Robert & Michael McGuire. (2003). *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press, Washington DC
- Najiyati, S., dan Topo, S.R. (2011). The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development. *Jurnal Ketransmigrasian*, Vol. 2, No.3, hal. 67 – 70
- Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik Dalam Prespektif Governance*. Smart Media. Surakarta
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-28. CV Alfabeta, Bandung
- The International Ecotourism Society. (2016). *Ecotourism Definition and Principles*. <http://www.ecotourism.org>. Diakses pada 22 Mei 2019